

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM BERBASIS MADRASAH PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MELAWI

Sugeng¹, Dr. Martoyo, MA², Dr. Erdi, M.Si²
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

surel: sugeng@student.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur birokrasi sebagai solusi dari implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Melawi Tahun Pelajaran 2019/2020 menjadi efektif. Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tempat penelitian di MTsN 2 Melawi. Waktu penelitian bulan Desember 2020 - April 2020. Subjek penelitian Kepala MTsN 2 Melawi, sedangkan informan dalam penelitian ini wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru rumpun PAI, Kepala Urusan Tata Usaha dan siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi, sedangkan analisa data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, reduksi, dan penarikan kesimpulan dengan model deskriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah dipengaruhi 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum di MTS N 2 Melawi. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Disposisi atau sikap implementor, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan Kurikulum telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Serta terjalinnya kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Faktor Penghambat Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah pada MTsN 2 Melawi yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum berbasis madrasah. Sarana dan prasarana pembelajaran dalam kelas masih belum tercukupi. Struktur hirarki dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis madrasah di MTsN 2 Melawi dirasakan masih berbelit. Sekolah hendaknya mengupayakan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman demi menunjang proses belajar dan prestasi belajar siswa. Guru hendaknya meningkatkan wawasan dan profesionalitas diri dengan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Kata kunci: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Implementasi, Madrasah, Kurikulum 2013.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan di era modern sedang mengalami perubahan yang cukup mendasar berkaitan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang diikuti oleh perubahan-perubahan pada teknis lainnya. Perubahan ini membawa tanggung jawab yang lebih luas kepada madrasah, khususnya kepada para administrator. Adapun perubahan mendasar yang berkaitan dengan sistem manajemen yang semula bersifat sentralisasi, sekarang berubah menjadi desentralisasi. Hal ini secara terang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 September 2014, yang menyatakan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: pendidikan..”. Paradigma baru manajemen pendidikan ini dalam perjalanannya dikenal dengan *School Based Manajement* (SBM). Manajemen berbasis sekolah ini merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta bisa menjalin kerja sama yang harmonis dengan sekolah dan

pemerintah.

Dalam konteks pendidikan di madrasah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berubah menjadi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). Hal ini perlu lebih ditekankan, mengingat madrasah merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kreatif, beriman dan bertaqwa, serta bertanggung jawab. Madrasah juga merupakan bentuk pendidikan yang sesuai dengan tuntutan reformasi, yakni pendidikan yang sangat murah dan berkualitas. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan madrasah ini diberikan tidak lain adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Dengan kata lain, melalui desentralisasi diharapkan permasalahan pokok pendidikan seperti: mutu, pemerataan, relevansi, dan efisiensi dapat terpecahkan. Oleh karena itu, tujuan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang sesuai dengan harapan pemerintah secara umum adalah untuk memandirikan atau membudayakan madrasah melalui pengambilan keputusan secara partisipatif.

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Melawi menjadi salah satu madrasah yang

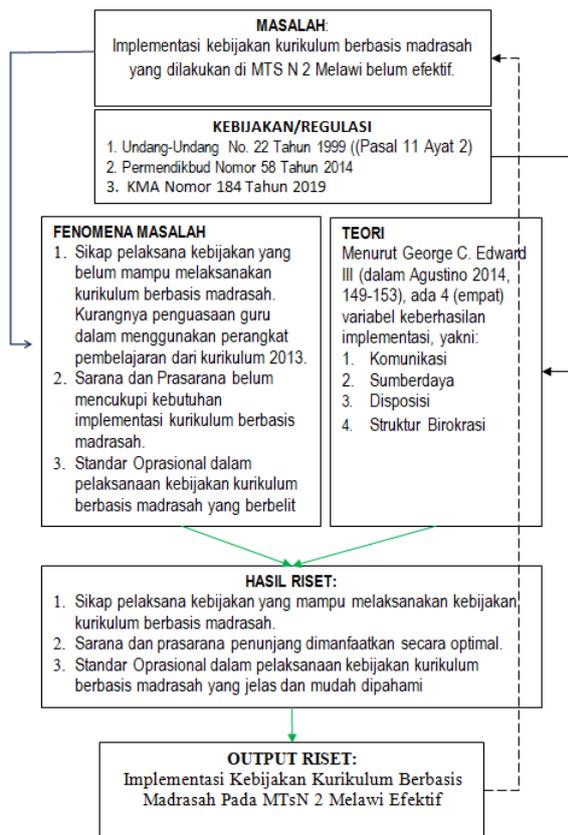
wajib mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan manajemen berbasis madrasah. Guru dan kepala madrasah harus siap mendukung kebijakan pemerintah tentang kurikulum sekolah yang baru ini agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. Guru harus memahami silabus, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan baik dan benar, menyiapkan bahan ajar, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, melakukan penilaian (evaluasi) hasil pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya agar implementasi kurikulum 2013 efektif. Guru-guru pada MTsN 2 Melawi yang sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013, buku-buku pegangan guru dan buku-buku teks untuk siswa sudah mulai ada dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*. Kepala madrasah berinisiatif menyediakan buku pegangan buat guru sendiri dan beberapa buku-buku teks siswa dibeli dari penerbit dan belum semua buku teks mata pelajaran ada.

Agar proses belajar-mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kurikulum yang baik dalam pembelajaran. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan demi

tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Sekolah merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Kurikulum yang digunakan di MTSN 2 Melawi yaitu Kurikulum 2013 (K13), namun dalam pelaksanaannya masih banyak menemukan hambatan adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Sikap pelaksana kebijakan yang belum mampu dalam melaksanakan kebijakan kurikulum berbasis madrasah. Dalam hal ini dapat dilihat dari Kurangnya penguasaan guru dalam menggunakan perangkat pembelajaran dari kurikulum 2013.
2. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang Implementasi Kebijakan Kurikulum Berbasis madrasah masih belum tercukupi. Contohnya, seperti kurangnya laptop, proyektor dan speaker pada masing-masing kelas.
3. Standar Operasional dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum berbasis madrasah yang berbelit.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2011, 6) bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di MTS N 2 Melawi.

Dipilihnya MTS N 2 Melawi hal ini dikarenakan hanya MTS N 2 Melawi saja yang menerapkan Kurikulum 2013. Penelitian yang penulis lakukan tergolong penelitian kualitatif, maka subjek dalam penelitian ini di ambil secara purposive. Pengambilan subjek penelitian secara purposive dilakukan karena peneliti ingin mencari informasi sedalam-dalamnya dan selengkap-lengkapnyanya. Informasi yang diperoleh itu hanya dapat diperoleh dari subjek penelitian yang paling berperan. Oleh karena itu, subjek utama sebagai responden adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Melawi. Alasannya adalah kepala madrasah merupakan pucuk pimpinan pada satuan pendidikan yang lebih banyak mengetahui berbagai hal tentang madrasah. Kepala madrasah juga merupakan salah satu pemegang kebijakan di madrasah yang bisa mengarahkan peneliti tentang informan berikutnya yang bisa diwawancarai.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-----------|
| a. Kepala sekolah | : 1 orang |
| b. Waka Kurikulum | : 1 orang |
| c. Wali kelas | : 1 orang |
| d. Guru Mapel | : 1 orang |
| e. Siswa | : 5 orang |
| f. Tata Usaha | : 1 orang |

Dalam penelitian ini, objek yang

akan diteliti adalah implementasi kurikulum berbasis Madrasah di MTS N 2 Melawi. Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ditekankan pada aspek validitas dan realibilitas. Dalam penelitian ini, yang diuji validitasnya adalah data. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data hasil penelitian dikatakan valid apabila data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian tidak berbeda. Realibilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data. Data dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama. Teknik triangulasi digunakan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

C. PEMBAHASAN

Menurut pendekatan yang diteoremaikan oleh Edward III (dalam Agustino, 2012:150-153), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi; (2)

sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. Berdasarkan teorema ini peneliti akan menjabarkan satu per satu bagaimana komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang ada di MTsN 2 Melawi dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis madrasah.

Komunikasi

Menurut Kepala MTsN 2 Melawi bahwa sudah sebagian guru mendapat sosialisasi dari Kementerian Agama Kabupaten Melawi baik berupa pelatihan secara umum maupun secara teknisnya. Perubahan Kurikulum Berbasis Madrasah yang tertuang dalam KMA Nomor 183 Tahun 2019 juga sudah disosialisasikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di MTsN 2 Melawi. Pernyataan kepala madrasah ini diperkuat oleh pernyataan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum yang mengatakan bahwa guru-guru di MTsN 2 Melawi sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi secara bertahap pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan pembagian tugas yang telah penulis uraikan pada sub bab di atas, terlihat sudah terjalin komunikasi yang baik antara kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan dan

siswa. Namun guru dan siswa masih merasa bingung dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, hal ini diungkapkan oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang mendapat laporan dari guru-guru sebagai aktor utama dalam implementasi kurikulum 2013 bahwa guru belum bisa menggunakan perangkat pembelajaran dari kurikulum 2013. Hal ini membuat proses belajar mengajar di MTsN 2 Melawi menjadi tidak efektif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sakirin, salah seorang guru tetap pada MTsN 2 Melawi yang mengajar Al-Qur'an Hadis. Sakirin mengatakan bahwa MTsN 2 Melawi belum siap menerapkan Kurikulum 2013, beberapa alasan yang diungkapkan : Pertama, guru belum memahami dengan baik struktur kurikulum, silabus, dan sistem penilaiannya. Kedua buku pegangan guru dan buku siswa belum ada, bagaimana bisa guru mengajar tanpa buku yang jelas. Ketiga, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat silabus, buku guru, dan buku siswa jika harus membuat buku secara mandiri. Menurut Sakirin, pemerintah harus menyediakan silabus, kompetensi inti dan kompetensi dasar serta buku-buku kurikulum 2013 dan perlu pelatihan ulang bagaimana cara penggunaan perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Jadi, setelah pelaksanaan

diklat, guru tinggal mengajar saja, tanpa harus dipusingkan dengan membuat silabus, perangkat-perangkat pembelajaran. Sehingga tujuan pendidikan di madrasah dapat tercapai dengan baik, proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif.

Menurut Arifin (2020) aspek penting dalam mencapai efektivitas komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi seharusnya menyeluruh, melihat berbagai aspek pada saat melakukan sosialisasi (Hal. 95).

Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik, maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan) yang di miliki oleh pelaksana kebijakan kurikulum 2013 itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Nugroho Sumber daya di sini dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (staff) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana).

Berdasarkan jumlah dan tingkat pendidikan tenaga pendidik pada MTsN 2 Melawi, seharusnya sudah cukup untuk pelaksanaan implementasi kurikulum berbasis madrasah diterapkan secara efektif. Namun ternyata kemampuan dan

sikap tenaga pendidik masih belum cukup untuk memahami dan menggunakan perangkat pembelajaran dengan kurikulum 2013 tersebut. Penyebabnya adalah belum semua guru mendapatkan pendidikan dan pelatihan bagaimana teknik menggunakan perangkat pembelajaran dan prosedur mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan efektif. Guru yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013 sebanyak 16 orang dari 19 orang tenaga pendidik. Berarti masih terdapat 3 orang tenaga pendidik yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum 2013.

Tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan tidak belajar kepada guru yang sudah mendapatkan pelatihan disebabkan guru yang sudah mendapatkan pelatihan belum memahami dengan baik bagaimana menggunakan perangkat pembelajaran kurikulum 2013 ini. Ditambah lagi dengan sarana dan prasana yang tidak mencukupi kebutuhan pembelajaran di kelas dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Sehingga menjadi salah satu sebab Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah pada MTsN 2 Melawi tidak berjalan efektif sesuai dengan harapan.

Dilihat dari faktor Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah

dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam hal ini para guru adalah sebagai implementor kurikulum 2013, dalam implementasinya masih ada guru MTS N 2 Melawi yang belum mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum 2013 ini. Namun karena MTS N 2 Melawi sudah menjadi target sasaran sebagai salah satu sekolah untuk melaksanakan implementasi kurikulum 2013 mau tidak mau, siap tidak siap, mereka harus mengimplementasikannya sehingga dalam proses implementasi sebagian guru dan hampir semua guru masih mengacu pada kurikulum lama baik dalam hal metode pembelajaran, bahan ajar dan penilaian terhadap siswa. Bahkan dalam kegiatan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang rutin dilaksanakan masih ada guru yang bukan bidang studinya mengikuti pelatihan di mata pelajaran tersebut sehingga tidak kompeten dengan pelatihan yang dia

dapatkan dan bahkan guru bidang studi yang seharusnya mendapatkan pelatihan malah tidak dimasukkan dalam pelatihan sehingga guru-guru yang belum dapat pelatihan mau tidak mau harus mencari informasi sendiri tentang maksud dan tujuan serta hakikat kurikulum 2013 tersebut dan mencari perangkat ajar dan sebagainya.

Disposisi

Faktor disposisi ini sangat penting dimana dalam hal ini mindset para guru MTS N 2 Melawi sebagian besar masih menggunakan pola ajar lama yaitu menghabiskan materi ajar sesuai silabus dan RPP dan memberikan penilaian terhadap siswa setiap habis Bab di setiap buku. Ada sebagian gurunya bersikap masa bodoh dengan kehadiran kurikulum 2013 ini dimana guru tersebut beranggapan bahwa kurikulum lama dengan kurikulum baru sama saja yang penting dia mengajar dan materi ajarnya selesai tanpa memperdulikan perubahan kurikulum tersebut. Namun ada beberapa guru yang menanggapi positif dan antusias dengan kurikulum 2013 ini. Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dan juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi dalam pelatihan tidak menjelaskan secara detail cara penilaian tersebut. Menurut Kabib Mustafa cara penilaian dalam kurikulum

2013 pada MTsN 2 Melawi dirasa sangat berbelit, mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru dalam menggunakan perangkat pembelajaran dan struktur kurikulum yang diterapkan. Ketidapahaman guru ini menimbulkan sikap apatis atau masa bodoh yang penting proses belajar mengajar dapat berjalan.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Menurut Edward III dalam Winarno kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konskuensi-konskuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan

bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operational Procedure (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Menurut Edward III dalam Nugroho, menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Pada Implementasi

kebijakan Kurikulum berbasis madrasah di MTS N 2 Melawi. Peneliti membagi penjelasan hasil mengenai struktur birokrasi menjadi 2 (dua). Kedua hal tersebut adalah standar operating procedure (SOP) dan Fragmentasi.

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan Kurikulum madrasah sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan Kurikulum berbasis madrasah. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP).

Standar Oprasional dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum berbasis madrasah yang berbelit. Seiring dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sakirin kepada peneliti, yang menyatakan bahwa belum ada Standar Operasional Prosedur yang jelas dari Kepala Madrasah tentang

Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah di MTsN 2 Melawi. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum menambahkan masih banyak guru yang belum memahami dengan benar bagaimana implementasi kurikulum 2013 di MTsN 2 Melawi ini, masih perlu belajar lagi. Materi yang diterima saat Diklat dirasakan belum memadai, karena waktu yang terbatas, materi yang banyak dan harus ditampuh hanya dalam 3 hari. Bagaimana bisa guru memahami langkah-langkah ataupun prosedur implementasi kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Pihak-pihak berwenang seharusnya memahami kondisi ini, agar bisa dilakukan pendidikan dan pelatihan secara mendalam mengenai prosedur dan langkah-langkah implementasi kurikulum 2013. Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Kabib Mustafa yakin bahwa implementasi kurikulum 2013 pada MTsN 2 Melawi dapat berjalan dengan efektif jika ada standar operasional prosedur yang jelas dari Dirjen Pendidikan Islam sebagai pedoman implementasi kurikulum berbasis madrasah.

Menurut Wiwik Setyorini selaku Kepala sekolah MTS N 2 Melawi, pada pelaksanaan kebijakan Kurikulum Madrasah yang bertujuan untuk memperbaiki pembangunan pendidikan, sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar prosedur yang berupa

teknis atau juknis pelaksanaan kebijakan kurikulum berbasis Madrasah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 184 Tahun 2019. Kegiatan pelaksanaan kebijakan Kurikulum berbasis Madrasah secara garis besar dengan melalui persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya temuan peneliti mengenai adanya SOP atau juknis yang merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan Kurikulum Berbasis Madrasah. Namun pada kenyataannya para pelaksana kebijakan di MTsN 2 Melawi masih belum memahami dengan baik teknik menggunakan perangkat pembelajaran.

Fragmentasi menurut Edward III dalam Winarno adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kebijakan diantara unit-unit organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, tanggung jawab ini berupa tanggung jawab memberikan penyuluhan, pelatihan dan pelayanan. Konskuensi paling buruk dalam fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain dalam implementasi Kurikulum berbasis Madrasah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan berapa faktor penghambat dan faktor pendukung Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah pada MTsN 2 Melawi.

Faktor Penghambat Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah pada MTsN 2 Melawi

Faktor pendukung adalah faktor yang sifatnya membantu jalannya suatu kegiatan dan bersifat memajukan atau mensukseskan kegiatan. Faktor pendukung yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian dalam implementasi kurikulum 2013 pada MTsN 2 Melawi menurut pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III (dalam Agustino, 2012:150-153), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. *Komunikasi* yang baik masih terjadi dengan baik di MTsN 2 Melawi. Berdasarkan uraian yang telah peneliti ulas pada sub bab di atas, bahwa Kebijakan Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah di MTsN 2 Melawi telah disosialisasikan dengan baik. Karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap guru menyebabkan penguasaan guru terhadap perangkat

pembelajaran menjadi tidak maksimal, sehingga implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

2. *Sumberdaya* menurut George C. Edward III dalam Nugroho Sumber daya dibedakan menjadi dua yaitu berupa sumber daya manusia (staff) dan non manusia (fasilitas atau sarana prasarana). Semua guru di MTsN 2 Melawi lulusan tingkat pendidikan Strata 1, menjadikan MTsN 2 Melawi sebagai salah satu madrasah yang ditunjuk untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Kompetensi guru yang bersertifikat pendidik atau lulus sertifikasi sebanyak 14 orang bisa menjadi motivator bagi guru lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013. Sedangkan sumber daya non manusia atau sarana dan prasarana di kelas yang kurang menyebabkan implementasi kurikulum berbasis madrasah di MTsN 2 Melawi tidak efektif.
3. *Disposisi*, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, hal ini berarti adanya dukungan dan kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatan keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif-persepektif para pelaksana

berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. *Struktur birokrasi*, Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan Kurikulum madrasah sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam

melaksanakan kebijakan Kurikulum berbasis madrasah. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP).

D. SIMPULAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Implementasi Kurikulum Berbasis Madrasah dipengaruhi 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sehingga oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
2. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kurikulum di MTS N 2 Melawi. Hal ini dikarenakan implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan

kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat.

3. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Selain sumber daya manusia hal yang sangat mempengaruhi implementasi kurikulum berbasis Madrasah adalah fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang penerapan kurikulum berbasis Madrasah.
4. Disposisi atau sikap implementor, kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. sikap pelaksanaan dalam implementasi kebijakan Kurikulum di MTS N 2 Melawi cukup baik
5. Struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan Kurikulum telah diatur

dalam prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Serta terjalannya kerjasama atau koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dan kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data, maka demi peningkatan dan perbaikan dalam proses belajar mengajar penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah

a. Sekolah hendaknya mengupayakan untuk memberikan fasilitas yang lebih baik dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman demi menunjang proses belajar dan prestasi belajar siswa, karena dengan adanya fasilitas yang representatif maka akan meningkatkan motivasi belajar siswa, dengan begitu prestasi belajar dapat terus meningkat.

b. Menciptakan komunikasi yang baik di setiap bagian madrasah, baik kepala madrasah, guru, staf tata usaha dan siswa untuk menciptakan suasana yang kondusif.

c. Meningkatkan wawasan dan profesionalitas sebagai guru dengan mengadakan kerjasama antar warga madrasah dan masyarakat sekitar.

d. Memperbaharui sarana prasarana dan fasilitas sebagai sumber belajar.

e. Menambah koleksi buku perpustakaan terlebih untk mata pelajaran kurikulum 2013 yang belum ada buku pegangannya.

f. Menggunakan kekuasaan dan wewenang sebagai kepala madrasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Guru

a. Guru hendaknya meningkatkan wawasann dan profesinalitas diri dengan terus mengikuti perkembangan teknologi informasi.

b. Guru harus bisa menciptakan suasana belajar di kelas menjadi menyenangkan dan tidak membosankan siswa.

c. Guru selalu memberikan motivasi kepada siswa agar meningkatkan konsentrasi saat proses belajar mengajar.

3. Siswa

Kepada para siswa untuk lebih meningkatkan konsentrasi dan motivasi pada saat proses belajar mengajar, karena materi yang

disampaikan oleh guru perlu dicerna dan dipahami, dan khususnya siswa hendaknya senantiasa mengembangkan motivasinya dalam belajar pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan bekal hidup yang sangat penting untuk kehidupan sekarang maupun pada masa yang akan datang.

E. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, A. 2020. “ Efektivitas Implementasi Penanggulangan Bencana Kabuat Asap di Kota Pontianak.” *JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development* 1, N0.2 (2020) : 197-198. doi.: <http://dx.doi.org/10.2648/jpasdev.v1i2.43654>
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Charles O'Jones, 1948: 27-28, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta : Rajawali Press.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ernawan, Erni R. 2007. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah. 7 Mei 2019. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. 7 Mei 2019. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soedomo S. 2015. *Siklus Kebijakan Publik*. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto. 2007. *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group Partner In Change.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.